

Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2019-2021

Dian Tri Agustin, Gideon Setyo Budiwitjaksono

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN "Veteran" Jawa Timur

Correspondence email: diantriagustin95@gmail.com, Gideon.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak. Kegiatan meneliti ini mempunyai tujuan guna memahami pengaruhnya dari PAD, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum kepada Belanja Modal Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2019-2021. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui *website* resmi DJPK Kemenkeu. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel penelitian ini yaitu 102 sampel. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh kepada Belanja Modal. Sementara Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Belanja Modal

Abstract. The purpose of this study was to determine the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Capital Expenditures of the Regency/City Government of East Java Province 2019-2021. This research data uses secondary data obtained through the official website of the Ministry of Finance DJPK. The sample selection technique used in this study was *purposive sampling*. The number of samples in this study was 102 samples. Based on the results of research that has been carried out, Regional Original Income and General Allocation Funds have an effect on Capital Expenditures. Meanwhile, the Special Allocation Fund has no effect on Capital Expenditures.

Keywords: Regional Original Income; General Allocation Funds; Special Allocation Funds; Capital Expenditures.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya otonomi daerah merupakan wujud nyata dari diberlakukannya pelaksanaan desentralisasi. Konsep sentral dari otonomi daerah sendiri yaitu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemda dengan cara melakukan pembangunan daerahnya sendiri, akan tetapi tetap adanya campur tangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut telah ditetapkan pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mana kemudian direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan seiring berjalannya waktu pemerintah memperbaharui menjadi UU No. 23 Tahun 2014 untuk menggantikan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasanya pemerintahan daerah mempunyai hak dalam melakukan pengaturan dan pengurusan sendiri kepentingan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Dengan di sahkannya otonomi daerah tersebut menimbulkan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menggali lebih dalam kemampuan daerah. Pemerintah harus meningkatkan anggaran belanja modal untuk menggali kemampuan daerah. Sumber dana yang dimanfaatkan dalam membiayai Belanja Modal yakni, PAD, DAU, dan DAK. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan terhadap masyarakat.

Sumber dana milik pemerintah daerah pada dasarnya akan di manfaatkan untuk pembiayaan pemerintah daerah. Dengan mengelola sumber dana tersebut maka pemerintah daerah untuk per tahunnya membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Suryani, dan Eka Pariani (2018) APBD yaitu perencanaan keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan diberi persetujuan bersama dengan DPRD, Pemda, maupun ditentukan dengan Perda. Mengacu terhadap PP No. 58 Th. 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan kewajiban pemda yang diakui merupakan pengurang nilai aset bersihnya. Pada operasionalisasi penyusunan anggaran, belanja daerah mencakup belanja langsung dan belanja tidak langsung. Menurut Suryani, dan Eka Pariani (2018) Belanja Modal yaitu sebuah pengeluaran yang dilaksanakan sebagai rangka membentuk modal yang bersifat meningkatkan kekayaan tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansinya. Hal ini berarti berisikan mengenai pengeluaran bagi beban pemeliharaan yang bersifat meningkatkan masa manfaatnya, menaikkan kapasitas serta kualitas asetnya. Pembelanjaan modal yang dipakai pada aktivitas pemerintah tersebut dapat berupa peralatan maupun mesin, tanah, gedung, jalan, bangunan, jaringan serta irigasi, maupun kekayaan atau aset tetap yang lain. Nilai persentase realisasi anggaran belanja modal yang dimiliki Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ini sangat bervariasi. Data tersebut dapat dilihat bawah persentase realisasi

anggaran belanja modal mengalami penurunan dalam Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Nilai persentase anggaran belanja modal memiliki nilai tertinggi yaitu diatas 150% dan memiliki nilai rendah yaitu dibawah 75%. Dengan pencapaian tingkat realisasi belanja modal yang memiliki nilai persentase yang rendah ini dapat dilihat yakni pemerintahan daerah masih belum berkomitmen yang kuat guna memberi peningkatan layanan terhadap masyarakat. Kurangnya belanja modal bisa terjadi dikarenakan Pemda lebih terfokuskan mempergunakan penerimaan daerah bagi belanja operasi dibandingkan belanja modal. Makin tinggi belanja modalnya makin mendakan yaitu pembangunan berjalan serta kualitas layanan publik makin baik.

Belanja modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu PAD. Didasarkan atas UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan diantara Pemerintah Pusat dan Pemda, PAD merupakan pendapatan yang sumbernya yaitu dari hasil retribusi daerah, hasil perpajakan daerah, hasil pengelolaan aset yang dipisahkannya, dsb PAD yang sah memiliki tujuan untuk memberi keluasaan kepada daerah untuk menggali sumber dana guna penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari asas desentralisasi. Di samping PAD, Dana Alokasi Umum pun merupakan suatu faktor yang mempengaruhi belanja modal. DAU merupakan dana yang dialokasikan tiap wilayah otonom (Prov/Kab/Kota) pada negara Indonesia tiap tahun yang merupakan dana pembangunan untuk pemeratakan finansial antardaerah guna membiayai keperluan daerahnya tersebut (Wulandari dan Emy Iryanie, 2018). DAK merupakan alokasi dari APBN terhadap Prov/Kab/Kota tertentu yang memiliki tujuannya guna membiayai aktivitas khusus sebagai kepentingan atau urusan Pemda dan sejalan terhadap prioritas nasionalnya (Rachim, 2015). Dana Alokasi Khusus ini dipakai dikhususnya guna membayarkan investasi pengadaan, peningkatan maupun perbaikan pra-sarana serta sarana fisik yang berumur ekonomis panjang.

METODE

Objek penelitian ini adalah APBD dan Laporan Rincian DAU, DAK Pemda Kab/Kota di Provinsi Jatim Periode 2019-2021. Data pada riset ini merupakan data sekunder yang didapat dari laman DJPK Kemenkeu. Metode dalam mengambil sampel yang dipakai yaitu teknik *purposive sampling*, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu. Mengacu terhadap pengambilan sampel tersebut, maka yang memenuhi kriteria diperoleh sebanyak 34 Kab/Kota Provinsi Jatim dengan jangka waktu yang diambil 3 tahun penelitian, sehingga diperoleh 102 data pengamatan yang digunakan sebagai sampel penelitian ini. Teknik yang dipakai pada kegiatan meneliti ini yakni statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik dan uji regresi linear berganda.

HASIL

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

N 102	102
Kolmogorov-Smirnov Z 1.259	1.259
Asymp. Sig. (2-tailed) .084	.084

Sumber: data olahan

Tabel 1 menjelaskan hasil dari tabel diatas yang telah disajikan memiliki nilai *Kolmogorov-Smirnov* 0,084 melebihi 0,05. Berarti data dalam penelitian ini berdistribusikan normal. Tabel 2 menjelaskan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas pada variabel independennya, dikarenakan masing-masing nilai *tolerance* melebihi 0,10 serta nilainya VIF ada kurang dari 10. Tabel 3 hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dianalisis dengan melihat nilai signifikansinya (sig. 2-tailed). Berdasarkan tabel diatas, bisa dipahami yakni variabel PAD memiliki nilai signifikansi sejumlah $0,657 > 0,05$, DAU memiliki nilai signifikansinya sejumlah $0,848 > 0,05$, dan DAK memiliki nilai signifikansinya sejumlah $0,824 > 0,05$. Sehingga berkesimpulan yakni seluruh variabel independen pada penelitiannya ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan Tabel 4 bisa dipahami yakni nilainya *Durbin-Watson* (DW-Test) yaitu 1,944, yang mana nilai itu ada diantara -2 hingga +2. Maka berkesimpulan yaitu tidak terdapat autokorelasi. Tabel 4 juga menjelaskan bahwa nilainya R^2 pada penelitiannya ini yakni sejumlah 0,526. Hal tersebut menandakan yakni kemampuan variabel independen yakni PAD, DAK, DAU, untuk memberi penjelasan variabel dependennya yaitu Belanja Modal sejumlah 52,6%. Sedangkan sisanya yaitu 47,4% diberi penjelasan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada kegiatan meneliti ini.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 PAD	.910	1.099
DAU	.359	2.787
DAK	.364	2.749

Sumber: data olahan

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Unstandardized Residual
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient
		.044
		Sig. (2-tailed)
		.657
		N
		102
	DAU	Correlation Coefficient
		.019**
		Sig. (2-tailed)
		.848
		N
		102
	DAK	Correlation Coefficient
		-.022**
		Sig. (2-tailed)
		.824
		N
		102
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient
		1.000
		Sig. (2-tailed)
		.
		N
		102

Sumber: data olahan

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.726 ^a	.526	.512	254018813956.11160	1.944

Sumber: data olahan

Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Table 3. Path Models Regression Analysis						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5663497093.885	94192945425.533		.060	.952
	PAD	.302	.033	.659	9.041	.000
	DAU	.306	.153	.232	2.003	.048
	DAK	-.251	.362	-.080	-.692	.490

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 5 persamaan model regresi yang didapatkan yaitu:

$$Y = 5663497093,885 + 0,302 + 0,306 + (-0,251) + \varepsilon$$

1. Nilai konstanta (α) 5663497093,885 menunjukkan apabila nilai konstan variabel independen bernilai nol, maka belanja modal sama dengan 5663497093,885.
2. Nilai koefisien PAD 0,302, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Kenaikan PAD satu satuan maka belanja modal naik 0,302 yang berasumsi yaitu variabel independen yang lain atas model regresi adalah tetap.
3. Nilai koefisien DAU 0,306, menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Kenaikan DAU satu satuan maka belanja modal naik 0,306 yang berasumsi yaitu variabel independen yang lain atas model regresi adalah tetap.

4. Nilai koefisien DAK -0,251, menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal tersebut bermakna tiap penurunan DAU satu satuan berarti belanja modal turun -0,251 yang berasumsi yaitu variabel independen yang lain atas model regresi adalah tetap.

Tabel 5 juga menjelaskan bahwa

- Nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah sejumlah $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh kepada belanja modal.
- Nilai signifikansi Dana Alokasi Umum sejumlah $0,048 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAU secara parsial berpengaruh kepada belanja modal.
- Nilai signifikansi Dana Alokasi Khusus sejumlah $0,490 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAK secara parsial tidak berpengaruh kepada belanja modal

Tabel 6
Hasil Uji F

Model	Df	F	Sig.
Regression	3	36.302	.000 ^b
1 Residual	98		
Total	101		

Sumber: data olahan

Tabel 6 dapat dikatakan bahwa uji F diperoleh nilai signifikansi $0.000 \leq 0,05$, maka secara simultan variabel independen (PAD, DAU, dan DAK) berpengaruh secara signifikan variabel dependen (Belanja Modal).

Pendapatan asli daerah yakni sumber utama penghasilan daerah yang asalnya dari beragam sumber kekayaan pada wilayah tersebut. Dengan besarnya pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula belanja modal yang akan dilakukan oleh pemda. Meningkatnya PAD tersebut dapat memberi manfaat guna memberi peningkatan ketersediaan fasilitas masyarakat dengan pembangunan sarana prasarana khususnya guna pembangunan infrastruktur (Huda, Saiful & Sumiati Ati, 2019). DAU sebagai transfer dana yang sifatnya umum atas pemerintahan pusat terhadap pemda dalam menangani ketimpangannya yang tujuannya untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah (Abdul Halim, 2007). Hasil penelitian diatas, dengan tingginya DAU yang diperoleh pemda makin tinggi juga belanja modalnya. Tinggi atau besarnya dana alokasi umum yang telah diberi pemerintahan pusat, maka pemerintahan daerah tersebut bergantung terhadap dana perimbangan yang dialokasi oleh pemerintahan pusat kepada wilayah untuk membiayai beragam aktivitas daerah (Huda, Saiful & Sumiati Ati, 2019). DAK termasuk salah satu dana yang dilakukan transfer oleh pemerintahan pusat terhadap pemda dipakai dengan khusus bagi program prioritas pemerintahan pusat sebagai rangka pembangunan nasionalnya. Akan tetapi dana alokasi khusus yang diterima tidak seimbang, karena alokasi tersebut tidak terserap kepada belanja modal tapi masih banyak dilakukan alokasi bagi belanja pegawai (Jayanti, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa PAD dan DAU memberi pengaruh kepada belanja modal, sementara DAK tidak memberi pengaruhnya kepada belanja modal Pemerintah Daerah Kab/Kota Prov Jatim. Secara keseluruhan variabel independen bersamaan memberi pengaruhnya kepada belanja modal sebagai variabel dependennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Huda, Saiful & Ati Sumiati. 2019. Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 14(1)
- Jayanti, Fitri Dwi. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA*, 8(3)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rachim AF. 2015. *Barometer Keuangan Negara/Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suryani, Eka Pariani. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Wulandari dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendaptan Asli Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.